



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan
Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Venessa

2016330112

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan
Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India**

Skripsi

Oleh

Venessa

2016330112

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

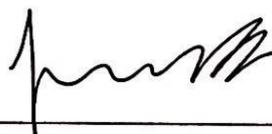


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Venessa
Nomor Pokok : 2016330112
Judul : Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan
Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 9 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

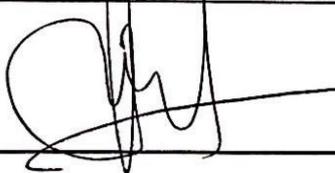
Tim Penguji
Ketua Sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Venessa

NPM : 2016330112

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak yang lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Desember 2019



Venessa

2016330112

ABSTRAK

Nama : Venessa
NPM : 2016330112
Judul : Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa meningkatnya aksi terorisme dari kelompok teroris Pakistan di India. India di masa pemerintahan Narendra Modi telah mengimplementasikan program-program terkait perlawanan terorisme. Ditambah, pendekatan Narendra Modi terkait terorisme ini juga melibatkan hubungan bilateralnya dengan Pakistan. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh Narendra Modi, angka serangan terorisme dari kelompok teroris Pakistan masih terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana kebijakan pemerintahan Narendra Modi mengenai terorisme kelompok teroris Pakistan justru meningkatkan ancaman terorisme di India?”**. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan konsep *Counterterrorism* yang menekankan perlawanan terorisme dengan sifat militeristik dan konsep *Counterinsurgency* (COIN) yang menekankan penggabungan sifat militeristik yang disandingi dengan pendekatan ke populasi area berkonflik sebagai kerangka pemikiran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengambil sumber data dari dokumen-dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Narendra Modi terlalu bersifat militeristik yang mengakibatkan peningkatan ancaman terorisme dari kelompok teroris Pakistan.

Kata Kunci: India, Pakistan, Terorisme, *Counterterrorism*, *Counterinsurgency*.

ABSTRACT

Name : Venessa
Student Number : 2016330112
Title : *The Analysis of Narendra Modi's policies in suppressing Pakistan's terrorist movement in India*

*The main purpose of this undergraduate thesis is to analyze the increase of terror attacks coming from Pakistan's terrorists in India. India under Narendra Modi's regime has implemented policies and programs regarding their efforts in countering terror attacks. Moreover, his policies include the role of Pakistan and their bilateral relations. Though policies and efforts have been implemented, the number of terror attacks increase instead of decreasing. This thesis answers the question of **"How does Narendra Modi's policies increase terror attacks from Pakistan's terrorists?"** To answer this question, the thesis uses the concept of Counterterrorism which emphasizes the militaristic approach and Counterinsurgency (COIN) which combines the use of military and its approach to the population as the theoretical framework. This thesis uses the qualitative method which uses documents as sources of the analysis. The analysis of the thesis will prove how Narendra Modi's policies that came too militaristic became the reason for the increase of the terror attacks from Pakistan's terrorists.*

Keywords: India, Pakistan, Terrorism, Counterterrorism, Counterinsurgency.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk mendapatkan gelar sarjana dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, India mengedepankan upayanya untuk mengeliminasi teroris dan aksinya. Hal tersebut tertuang pada pernyataan-pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi di awal masa pemerintahannya. Salah satu permasalahan utama di India adalah terus munculnya serangan terorisme dari kelompok teroris Pakistan, terutama di daerah Jammu dan Kashmir. Tentunya serangan tersebut mengancam keamanan domestik masyarakat India. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pada umumnya negara akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Namun, yang menjadi pembeda dalam masa pemerintahan Narendra Modi adalah perlawanan balik yang menggunakan kekuatan militer, yang tentunya melewati perbatasan negara India dan Pakistan.

Penelitian ini menganalisis meningkatnya serangan teroris dari kelompok teroris Pakistan, meskipun pemerintahan telah mengupayakan dan mengimplementasikan kebijakan yang melawan aksi tersebut. Kebijakan yang terlalu militeristik justru memicu serangan-serangan serta ancaman baru di India.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan. Harapan penulis terkait penelitian ini adalah agar memberikan manfaat untuk para pembaca dan pihak yang bersangkutan. Besar harapan penulis agar penelitian ini diberikan saran, kritik, dan rekomendasi untuk menyempurnakan penelitian ini.

Bandung, Desember 2019

Venessa

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tertulis merupakan ucapan yang berasal dari penulis secara tulus dan bukan sekadar basa-basi. Urutan nama tidak berbanding lurus dengan urutan kepentingan bagi penulis. Penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

Tuhan Yang Maha Esa – karena telah melindungi penulis selama masa hidupnya hingga bisa menyelesaikan skripsi serta perjalanan perkuliahan penulis. Tanpa perlindungan dan bimbingan dariNya, penulis tidak mungkin bisa mencapai akhir dari masa perkuliahan ini.

Saya – sebagai penulis tunggal dari skripsi ini. Tanpa usaha, air mata, serta emosi yang dialihkan menjadi tenaga untuk menulis, skripsi ini tidak mungkin selesai. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri.

Mami, Papi, dan Koko – tanpa dukungan moral dan finansial, penulis tentunya tidak bisa menjaga keberlangsungan kehidupan yang layak untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oh Sehun – selaku figur yang menjadi acuan penulis untuk menyelesaikan masa pendidikan penulis sedari 9 tahun yang lalu. Terima kasih karena selalu bisa menjadi penghibur dikala penulis merasa putus asa dan ingin menyerah.

Semua insan yang berdampak pada masa perkuliahan,

Mas Idil Syawfi – selaku dosen pembimbing yang membantu penulis untuk menjalani dan menyelesaikan perjalanan pembuatan skripsi ini.

Mba Jessica Martha – selaku dosen mata kuliah Praktik Diplomasi yang telah memberikan kepercayaan serta banyak pelajaran dalam bekerja sama dengan dosen secara profesional.

Seluruh dosen – karena telah memberikan banyak pengetahuan baik secara akademis maupun non-akademis selama masa perjalanan kuliah penulis. Tanpa perlu disebutkan satu per satu, seluruh dosen yang pernah bersinggungan dengan penulis semuanya benar-benar berarti.

Teman spesial – Dodit Soegondo, yang selalu sabar dalam menemani penulis melewati masa-masa sulit.

Pertemanan Eksklusif – Verins Aura, Nadia Viranissa, Felicia Tiara, Nadine Putri, selaku teman-teman seperjuangan semenjak semester pertama penulis berkuliah di UNPAR.

Kelompok Upnormal Homies – Mahira Kanya dan Nabila Aulia, selaku teman-teman yang menemani penulis hingga subuh, berjuang bersama, untuk menyelesaikan skripsi.

Teman-teman HI 15 – Joshua Adrian, Manuel Vito, Yazid Lubis, Carol Wetik, Santi Rebecca, dan lainnya, yang membantu penulis untuk menjalani hari dan malam di Bandung.

Bandung – sebagai kota yang hingga saat ini masih penuh dengan misteri dan telah memberikan penulis tantangan baru untuk hidup mandiri dalam mencari jati diri.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR AKRONIM.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II Kebijakan India terhadap Pakistan pada Masa Pemerintahan Narendra Modi	25
2.1 Ancaman kelompok teroris Pakistan terhadap India	25
2.1.1 Serangan Terorisme Pakistan di India tahun 2016	27
2.1.2 Serangan Kelompok Teroris Jaish e-Mohammed tahun 2019.....	28
2.2 Kebijakan Pertahanan Negara India Narendra Modi.....	30
2.2.1 CRPF sebagai alat pertahanan terhadap serangan kelompok teroris Pakistan	32

2.2.2 Strategi Pertahanan dan Keamanan Militer India terkait kelompok teroris Pakistan	36
2.3 Kebijakan Luar Negeri Narendra Modi terhadap Pakistan.....	41
2.3.1 Kebijakan Regionalisme Narendra Modi terkait hubungan India dengan Pakistan	43
BAB III Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India	48
3.1 Kebijakan Narendra Modi sebagai bentuk <i>counterterrorism</i> India terhadap kelompok teroris Pakistan.....	48
3.1.1 CRPF sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga keamanan domestik.....	48
3.1.2 Militer India dan Modernisasinya	50
3.1.3 Sanksi dan pemboikotan yang dilakukan Narendra Modi terhadap Pakistan	53
3.2 Upaya Narendra Modi menggunakan <i>Soft Approach</i> dalam menekan kelompok teroris Pakistan.....	56
3.2.1 <i>Soft Approach</i> Narendra Modi terhadap Pakistan.....	56
3.3 Perbandingan Pendekatan <i>Counterterrorism</i> dan <i>Counterinsurgency</i> India terhadap Kelompok Teroris Pakistan	60
3.3.1 Kebijakan Militeristik Modi melalui Pandangan COIN	61
3.3.2 Ketidakberhasilan Narendra Modi dalam Menekan aksi terorisme.....	65
BAB IV Kesimpulan.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR AKRONIM

BIMSTEC	<i>Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation</i>
BRICS	<i>Brazil Russia India China South Africa</i>
CJM	<i>Criminal Justice Model</i>
CoBRA	<i>Commando Battalion for Resolute Action</i>
COIN	<i>Counterinsurgency</i>
CRPF	<i>Central Reserve Police Force</i>
ECJM	<i>Expanded Criminal Justice Model</i>
JeM	<i>Jaish-e-Mohammed</i>
ISI	<i>Inter-Services Intelligence</i>
LeT	<i>Lashkar-e-Taiba</i>
LoC	<i>Line of Control</i>
MACP	<i>Military Aid to the Civil Power</i>
MFN	<i>Most-Favored Nation</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SAARC	<i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
SATP	<i>South Asian Terrorism Portal</i>
SOG	<i>Special Operation Group</i>
UJC	<i>United Jihad Council</i>
WM	<i>War Model</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

India merupakan salah satu negara yang kerap terkena dampak dari aksi terorisme. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa keamanan India secara domestik terancam. Narendra Modi di periode pertamanya, sudah menyatakan kekhawatirannya terhadap terorisme ini melalui pernyataannya di pertemuan PBB pada September 2014 silam.¹ Melalui pernyataannya, Narendra Modi secara tidak langsung menyinggung negara-negara yang memberikan tempat tinggal bagi para teroris internasional dan seharusnya hal tersebut menjadi problematika bagi hukum dan ketentuan negara itu sendiri. Selain itu, Narendra Modi juga menyatakan bahwa para teroris yang diberikan perlindungan oleh negara bisa dijadikan sebagai alat kebijakan negara itu sendiri.² Tentunya Modi memiliki kekhawatiran-khawatiran tersebut karena Pakistan, negara tetangganya, merupakan ‘*safe haven*’ untuk para teroris yang sering kali menyerang wilayah domestik India.

Salah satu badan intelejen yang sangat disorot dan berkaitan dengan terorisme di Pakistan adalah *Inter-Services Intelligence* (ISI). Kelompok intelijen yang bersifat militeristik ini diduga berkaitan dengan komplotan teroris. Hal ini lah yang menyebabkan Pakistan menjadi negara yang diklasifikasikan sebagai negara

¹ Somini Sengupta, “Narendra Modi, in U.N’s Speech, Inserts India Into Terrorism Fight,” *The New York Times*, 27 September 2014, <https://www.nytimes.com/news/un-general-assembly/2014/09/27/narendra-modi-in-u-n-speech-inserts-india-into-terrorism-fight/>

² *Ibid.*

yang mensponsori teroris.³ Sejak pertengahan tahun 1950, ISI sudah memiliki hubungan yang cukup erat dengan kelompok-kelompok separatis seperti *United Liberation Front of Assam*, *the People's Liberation Army*, dan lainnya. Hubungan erat tersebut dapat dilihat dari bagaimana ISI memberikan suntikan dana yang besar dalam hal uang, senjata, dan pelatihan.⁴ Hal ini memperkuat dugaan bahwa pemerintahan Pakistan menjadikan terorisme sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya. Keterkaitan ISI dengan banyak kelompok separatis ini memberikan pandangan bahwa ISI sangat berpengalaman dengan kelompok-kelompok separatis yang suatu saat bisa berkembang menjadi kelompok teroris.

Pakistan merupakan salah satu negara yang diduga mendukung kegiatan terorisme dan melindungi kelompok teroris yang berasal dari negaranya. Beberapa kelompok teroris seperti Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Tayyiba (LeT) bertempat dan berlatih di wilayah teritorial Pakistan. Ditambah lagi, kelompok teroris LeT ini merupakan kelompok teroris yang didukung dan disponsori oleh pemerintah Pakistan.⁵ Hal tersebut dikarenakan adanya pernyataan bahwa Direktorat Intelijen Pakistan memiliki ikatan kuat terhadap kelompok tersebut. Juga, mantan Perdana Menteri dan Kepala Staf Militer di Pakistan, Pervez Musharraf pun telah menyatakan bahwa memang pasukan-pasukan militan di Pakistan secara

³ Owen L. Sirrs, *Pakistan's Inter-Services Intelligence Directorate* (New York: Routledge, 2017), 148-149

⁴ Hein G. Kiessling, *Faith, Unity, Discipline The Inter-Service-Intelligence of Pakistan* (London: Hurst & Co, 2016), 5

⁵ Angel Rabasa, Robert D. Blackwill, Peter Chalk, Kim Cragin, and others, *The Lessons of Mumbai* (2009): 13, RAND Corporation.

umum dilatih secara militer untuk menyerang India, terutama di wilayah Kashmir.⁶ Secara berulang, selama masa sebelum dan berlangsungnya pemerintahan Narendra Modi, India mengalami ancaman serta serangan terorisme yang berasal dari kelompok teroris Pakistan.

Selain pelatihan militer kelompok-kelompok teroris tersebut dilakukan oleh Pakistan, India bersikeras dengan dugaannya bahwa ISI terlibat dalam pembuatan kelompok teroris JeM ini. Menurut pandangan pemerintahan India, adanya keterlibatan ISI dalam pembuatan kelompok teroris tersebut dengan tujuan merusak keamanan dan pertahanan India.⁷ Dapat disimpulkan bahwa ISI yang kerap berkaitan dengan kelompok-kelompok separatis ini mendukung terbentuknya kelompok-kelompok teroris, seperti JeM yang digunakan untuk menyerang negara tetangganya, India. Pembentukan kelompok teroris yang berkaitan dengan kelompok intelijen ini tentunya meresahkan pemerintahan India.

Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India tentunya perlu mengambil langkah dan menindaklanjuti dalam mempertanggungkan kepentingan negaranya, yaitu keamanan domestik wilayah negara. India pada masa pemerintahan Modi mengadopsi kebijakan *Neighbourhood First*.⁸ Artinya, salah satu upaya Narendra Modi dalam mencapai kepentingan negaranya adalah melalui hubungannya dengan negara-negara tetangganya yang salah satunya adalah Pakistan. Berdasarkan dari

⁶“Musharraf Admits Kashmir Militants Trained in Pakistan,” *BBC*, 5 Oktober 2010, <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11474618>

⁷ “Foreign Terrorist Organizations,” *CRS Report for Congress* (The Library of Congress, 2004): 42

⁸ Pooja D. Vernekar, “Evaluation of Narendra Modi Foreign Policy,” *International Research Journal of Commerce Arts and Science* (2018): 108-109

kebijakan *Neighbourhood First* tersebut, Narendra Modi mengajak Pakistan, sebagai salah satu anggota kelompok regional SAARC untuk hadir dalam inaugurasinya sebagai PM baru di India.⁹ Di lain sisi, Narendra Modi juga menegaskan kepentingan negaranya dalam melawan terorisme, terutama terorisme yang berasal dari negara Pakistan. Berdasarkan pernyataannya, Narendra Modi secara tegas akan menindaklanjuti para teroris yang menyerang India, terutama di daerah Jammu dan Kashmir, menggunakan ‘bahasa’ yang dipahami oleh para teroris tersebut.¹⁰ Dengan kata lain, India di bawah pimpinan Modi akan secara tegas menindaklanjuti dengan bantuan militer. Melalui pernyataannya tersebut, dapat digambarkan bahwa pemerintah-pemerintah sebelumnya tidak pernah secara langsung menyerang para teroris yang berasal dari Pakistan ini.

Arah kebijakan Modi diperjelas melalui pernyataannya di salah satu pertemuan *Brazil, Russia, India, China, and South Africa* (BRICS) yang menyebutkan perlu adanya koordinasi yang jelas terkait pendanaan teroris. Selain itu, Modi juga menganggap negara yang melindungi, mendukung, serta mensponsori kelompok teroris adalah ancaman bagi negaranya.¹¹ Pemerintahan Narendra Modi tentunya juga mengambil langkah dengan memajukan serta memodernisasi pertahanan India dengan tujuan menciptakan rasa aman apabila suatu saat akan mengalami perang. Meskipun berbagai ancaman dilakukan oleh

⁹ *Ibid.*

¹⁰ “India Now Follows New Policy of Dealing with Terrorist: PM Modi,” *Economic Times*, 9 Maret 2019, <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-now-follows-new-policy-of-dealing-with-terrorists-pm-modi/articleshow/68333009.cms?from=mdr>

¹¹ “Press Statement by PM following the 8th BRICS Summit,” PM India, diakses pada 28 November 2019, https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-indias-approach-to-climate-change-conference-to-be-held-in-spain-next-week/?comment=disable

kelompok teroris Pakistan terhadap India, India terus meninjau kembali kebijakan yang harus dilakukan dalam melindungi wilayah serta masyarakatnya. Aksi terorisme dan ancaman akan terorisme ini akan terus berlangsung dikarenakan ketegangan diantara kedua negara ini yang memang sudah saling bersaing sejak bebas dari Inggris. India mengharapkan adanya kerjasama dengan pihak Pakistan. Namun, dilihat dari bagaimana Pakistan memberikan peluang bagi kelompok teroris tersebut untuk berkembang mengecilkan harapan India untuk berdamai dengan negara tetangganya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari laporan yang telah dikeluarkan oleh *Global Terrorism Index* atau GTI pada tahun 2019, India berada di dalam peringkat ke 7 sebagai negara yang paling terkena dampak dari aksi terorisme.¹² Berdasarkan laporan tersebut juga dapat dilihat bahwa India mengalami kenaikan peringkat dari peringkat 8 menjadi peringkat 7 dari tahun sebelumnya dengan nilai GTI sebesar 7.518. Menurut GTI negara dengan nilai 6 hingga 8 berada di klasifikasi 'high' dan hal ini sangat menunjukkan bahwa India hingga tahun 2019 pun masih terkena dampak terorisme yang sangat serius.

Laporan GTI tersebut juga memberikan informasi bahwa Jammu dan Kashmir merupakan wilayah yang paling terkena dampak aksi terorisme di tahun 2018.¹³ Hal ini dikarenakan menurut laporan tersebut terjadi sekitar 321 serangan

¹² Institute for Economics & Peace, *Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism*, November 2019, 7-8.

¹³ *Ibid*, 25

terorisme yang tentunya menghasilkan korban jiwa sebanyak 123 kematian. Serangan-serangan tersebut secara garis besar berasal dari kelompok teroris Pakistan seperti Hizbul Mujahideen, JeM, dan LeT.¹⁴ Laporan tersebut diperkuat dengan adanya laporan dari Kementerian Dalam Negeri India yang menunjukkan adanya peningkatan serangan terutama di daerah Jammu dan Kashmir. Menurut laporan tersebut tahun 2018 merupakan tahun dimana India mengalami serangan terorisme terbanyak, yaitu sebanyak 614 kejadian.¹⁵ Dalam laporan tersebut telah dijabarkan secara jelas bahwa wilayah Jammu dan Kashmir ini mengalami banyak kerugian yang diakibatkan oleh aksi teroris yang disponsori oleh negara tetangga.

Laporan Kementerian Dalam Negeri India pada tahun 2014-2015 dan tahun 2018-2019 memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama laporan terkait situasi keamanan di Jammu dan Kashmir. Dalam laporan tahunan tersebut, aksi teroris yang terjadi, terutama di daerah Jammu dan Kashmir, berjumlah 222 kejadian. Dan menurut laporan tersebut, India telah berhasil menetralsir kurang lebih 64,18% teroris.¹⁶ Laporan yang membuktikan adanya penurunan jumlah korban dari tahun sebelumnya ini seharusnya membuktikan keyakinan pemerintahan India yang bisa menekan aksi terorisme dan korban akibat aksi tersebut. Namun, sesuai dengan kenyataan berdasarkan laporan yang dikeluarkan pada tahun 2018-2019, terjadi bukan hanya peningkatan aksi terorisme saja tetapi juga ada peningkatan dalam hal korban akibat dari aksi tersebut.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ministry of Home Affairs of India, Annual Report of 2018-2019 Official Documents, 2019, 15

¹⁶ Ministry of Home Affairs of India, Annual Report of 2014-2015 Official Documents, 2019, 5

Aksi terorisme yang berasal dari kelompok teroris Pakistan kembali menjadi sorotan pada awal tahun 2019. Pada bulan Februari 2019, terjadi lagi aksi teroris yang menargetkan kepolisian India (CRPF) dengan melakukan aksi bom bunuh diri menggunakan kendaraan yang mengangkut bom seberat 100 kg.¹⁷ Pelaku yang diduga pernah dipukuli oleh pihak keamanan India ini membalas dendam dengan membunuh kurang lebih 40 personel kepolisian CRPF India.¹⁸ Penyerangan ini dianggap sebagai aksi terorisme terparah yang pernah dialami oleh India. Dari hal ini, kebijakan India yang selama ini telah diimplementasikan oleh Narendra Modi justru menimbulkan pertanyaan mengenai peningkatan aksi terorisme yang terus berlangsung dan malah semakin parah di India.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada tahun 2014-2019. Dalam kurun waktu tersebut adalah masa pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menjabat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Penulis akan fokus ke dalam pengimplementasian kebijakan India pada masa pemerintahan Narendra Modi dalam menekan gerakan terorisme yang dilakukan oleh Pakistan. Alasan penelitian diawali dari tahun 2014 sebagai masa awal pemerintahan Narendra Modi. Selain itu penulis juga ingin menganalisa pendekatan yang digunakan pada masa pemerintahan Narendra Modi terhadap negara Pakistan yang dianggap mendukung

¹⁷ "Jaish Terrorist Attacks CRPF Convoy in Kashmir, Kill at Least 40 Personnel," *Times of India*, 16 Februari 2019, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/37-crpf-jawans-martyred-in-ied-blast-in-jks-pulwama/articleshow/67992189.cms>

¹⁸ "Pulwama Bomber Adil Ahmad Dar Became Terrorist After He was Beaten by Troops, Say Parents," *India Today*, 16 Februari 2019, <https://www.indiatoday.in/india/story/pulwama-bomber-adil-ahmad-dar-became-terrorist-after-he-was-beaten-by-troops-say-parents-1457317-2019-02-15>

kelompok-kelompok terorisme yang telah melakukan aksi kejahatannya di India. Penelitian akan diakhiri pada tahun 2019 untuk melihat perkembangan Modi dalam menekan gerakan terorisme Pakistan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Setelah mengerucutkan fokus penelitian dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, penulis akan lebih mengarahkan penulisan ini dengan rumusan masalah: **“Bagaimana kebijakan pemerintahan Narendra Modi mengenai terorisme kelompok teroris Pakistan justru meningkatkan ancaman terorisme di India?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian adalah untuk menganalisa alasan meningkatnya aksi terorisme di India yang dilakukan oleh teroris Pakistan. Penulis ingin membuktikan bahwa kebijakan Narendra Modi yang terlalu bersifat militeristik justru meningkatkan ancaman terorisme yang berasal dari kelompok teroris tersebut. Penelitian ini juga ingin menjabarkan kebijakan Narendra Modi yang kurang mengarah dan bersifat untuk publik dan lebih mengarah ke pertahanan negara secara militer dan kepolisian.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan. Juga, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah serta mengembangkan khasanah literatur

penulis. Penulis mengharapkan penelitian ini mampu mendorong peneliti-peneliti lain untuk meneliti lebih mengenai permasalahan ini.

1.4. Kajian Literatur

Penelitian ini didasari dari dua pandangan besar terkait kebijakan Narendra Modi terhadap terorisme. Pandangan pertama adalah penyelesaian terorisme dapat diselesaikan oleh India dengan upaya peningkatan pertahanan seperti militer dan kepolisian. Pandangan kedua adalah penyelesaian terorisme dapat diselesaikan dengan upaya yang menggabungkan faktor lain selain hal yang bersifat militeristik dalam penyelesaian konflik dan menganggap kebijakan Narendra Modi justru kurang efektif dan menyebabkan eskalasi konflik. Kedua pandangan besar tersebut dapat ditemukan dari literatur-literatur yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Literatur pertama berasal dari *Journal of Strategic Studies* dengan judul “*Indian Military Modernization and Conventional Deterrence in South Asia*” karya Walter C. Ladwig III. Menurut Ladwig, salah satu penyebab ketegangan antara India dan Pakistan terjadi ketegangan yang berkepanjangan. Bagi Ladwig, stabilitas akan sulit dicapai dan mungkin akan menghasilkan perang konvensional dalam waktu dekat. Banyaknya terorisme yang menjadi ancaman bagi masyarakat India membuat Modi meningkatkan pengeluaran biaya dalam militer hingga \$39.8 triliun. India sempat menjadi pembeli dalam angka yang sangat besar. Meskipun India memberikan rasa aman pada masyarakatnya dengan meningkatkan militer mereka, bagi Ladwig, hal tersebut justru membuat Pakistan merasa semakin terancam.¹⁹

¹⁹ Walter C.Ladwig III, “Indian Military Modernization and Conventional Deterrence in South Asia,” *Journal of Strategic Studies* (Mei 2015): 730

Walaupun pasokan senjata Pakistan tidak sebesar India, Pakistan masih lebih sering melancarkan penyerangan-penyerangan yang diwakili oleh kelompok terorisnya. Dalam literatur ini, India digambarkan sebagai negara yang harus meningkatkan keamanannya terutama dalam hal militer, bukan hanya kebijakan saja.

Literatur sebelumnya dapat didukung dengan literatur karya Harsh V. Pant dan Ivan Lidarev dengan judul “*Indian Counterterrorism Policy and the Influence of the Global War on Terror*” dalam Jurnal *India Review*. Menurut Pant dan Lidarev, kebijakan-kebijakan harus diimplementasikan dengan tegas dalam menanggulangi masalah terorisme yang berasal dari Pakistan. Institusi pun dikembangkan guna memudahkan pengimplementasian kebijakan-kebijakan India. Institusi tersebut berupa *National Investigation Agency*, *National Counter Terrorism Center*, dan *National Intelligence Grid*. Selain melalui institusi, India juga meningkatkan kekuatan legislatifnya dengan berbagai peraturan.²⁰ Institusi dan legislatif menjadi dasar India dalam meningkatkan keamanan negaranya, terutama dengan model *counterterrorism* yang dipilih oleh India. India menggunakan model *criminal justice*, dimana para pelaku tersebut disidang oleh pihak berwajib (polisi) di India.²¹

Kedua literatur ini memiliki pandangan yang sama, yaitu meningkatkan keamanan negara dengan modernisasi militer dan lainnya. Secara garis besar pun dapat dilihat bahwa kedua literatur tersebut memiliki pandangan mengenai cara

²⁰ Harsh V. Pant dan Ivan Lidarev, “Indian Counterterrorism Policy and the Influence of the Global War on Terror,” *India Review* (April 2018): 188

²¹ *Ibid.*

penyelesaian masalah terorisme dengan melawan langsung teroris tersebut. Namun, ada pandangan lain yang dapat dipertimbangkan untuk menanggulangi masalah terorisme ini.

Pandangan lain mengenai kebijakan Narendra Modi dijabarkan melalui literatur karya George Perkovich dan Toby Dalton dengan judul *Modi's Strategic Choice: How to Respond to Terrorism From Pakistan*. Artikel yang berasal dari jurnal *The Washington Quarterly* ini memiliki beberapa pandangan yang berbeda dibandingkan kedua literatur sebelumnya terkait kebijakan Narendra Modi. Dalam artikel tersebut, penulisnya berasumsi apabila India menggunakan kekuatan militernya terhadap Pakistan, maka Pakistan sendiri juga tidak akan segan menggunakan kekuatan militernya. Kebijakan Narendra Modi yang melancarkan serangan militer ke wilayah Pakistan ini justru memberikan Pakistan alasan yang sangat kuat untuk menyerang balik wilayah India secara langsung dan bukan melalui kelompok teroris lagi.²² Berbeda dengan pandangan dari literatur-literatur sebelumnya, literatur ini justru menunjukkan adanya pandangan kontra terkait kebijakan yang diimplementasikan Narendra Modi terhadap negara tetangganya terkait terorisme. Selain itu, dalam literatur tersebut juga memberikan asumsi baru terkait sudut pandang masyarakat Pakistan yang pastinya juga merasa tidak aman apabila diserang oleh pasukan militer India.

Pandangan sebelumnya dapat didukung melalui pentingnya memenangkan hati populasi di area berkonflik yang dibahas di dalam literatur berjudul *Countering*

²² George Perkovich & Toby Dalton, "Modi's Strategi Choice: How to Respond to Terrorism from Pakistan," *The Washington Quarterly* Vol 38 No. 1 (May 2015): 27-30

Others' Insurgencies karya Stephen Watts, Jason H. C, dan lainnya. Literatur ini lebih mengedepankan paham *counterinsurgency* yang telah diadopsi oleh negara-negara Barat. Literatur ini memiliki pandangan yang sama dengan literatur sebelumnya yang menggabungkan pengimplementasian kebijakan yang mengarah ke pertahanan dan juga ke populasi area berkonflik. Dalam literatur ini pun ditekankan perlu adanya penyediaan fasilitas publik yang baik dengan upaya menurunkan aksi-aksi kejahatan dari kelompok militan. Hal ini juga merupakan upaya agar para populasi yang berada di wilayah berkonflik tersebut menjadi loyal dan mencegah populasi tersebut berpindah pihak ke para kelompok militan.²³

Kedua literatur terakhir secara garis besar memiliki pandangan yang sama dalam melawan kelompok militan yaitu mengimplementasikan kebijakan yang bukan hanya terhadap pertahanan sebuah negara atau wilayah saja tetapi juga bersanding dengan memenangkan hati dan loyalitas populasi di area berkonflik tersebut. Dua literatur pertama memiliki pandangan positif terkait kebijakan yang dijalankan oleh Narendra Modi. Namun, hal tersebut dapat disangkal melalui dua literatur terakhir yang mengindikasikan ketidaksempurnaan kebijakan yang dijalankan oleh Narendra Modi. Penulis akan memakai dua literatur terakhir ini sebagai dasar argumen mengenai penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Analisa sebuah fenomena harus didasari dengan sebuah kerangka pemikiran menggunakan sebuah konsep. Konsep yang digunakan dalam penulisan ini sebagai

²³ Stephen Watts, Jason H. C., Patrick B.J & others, *Countering Others' Insurgencies* (RAND Corporation, 2014), 11-12

kerangka pemikiran adalah konsep *counterterrorism* dan *counterinsurgency*. Kedua konsep tersebut akan menjadi dasar perdebatan dalam analisa dari penelitian penulisan ini.

Kedua konsep *counterterrorism* dan *counterinsurgency* memiliki tujuan yang hampir sama namun dengan pendekatan yang cukup berbeda. Dalam konsep *counterterrorism*, ada dua model yang digunakan konsep ini untuk memberantas aksi terorisme. Model tersebut adalah *Criminal Justice Model* (CJM) dan *War Model* (WM). Kedua model ini pun berkembang hingga menjadi sebuah model *hybrid* dengan menggabungkan kedua model tersebut menjadi *Expanded Criminal Justice Model* (ECJM).²⁴ Sebagai sebuah gabungan model CJM dan WM, ECJM memandang aksi yang dilakukan dijustifikasi dengan kepentingan untuk mencapai “*the greater good*” dan kepentingan mayoritas.

Dalam pelaksanaan konsep ini, ada beberapa poin besar yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisa penelitian ini. Poin besar ini merupakan langkah-langkah yang dibagi menjadi lima kategori, yaitu politik, hukuman (*punitive measures*), yudisial, militer, pembatasan pergerakan dan polisi. Enam poin tersebut merupakan poin-poin yang dianggap penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Terkait dengan *counterterrorism*, langkah-langkah yang digunakan untuk memberantas terorisme secara politik adalah dengan menyatakan adanya keresahan terkait teroris ini yang mempengaruhi politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara

²⁴Rohan Gunaratna & Graeme C. S. Steven, *Counterterrorism* (California: ABC-CLIO, 2004),101

dan masyarakatnya. Langkah-langkah tersebut dilengkapi dengan adanya inisiasi proses perdamaian yang melibatkan adanya dialog publik, mediasi, serta negosiasi.²⁵ Menurut konsep ini, para pelaku teroris sudah seharusnya dihukum atas apa yang telah dilakukannya. Namun, perlu ditekankan bahwa mereka dihukum bukan berdasarkan apa yang menjadi pedoman hidupnya, melainkan aksi-aksi terorismenya. Terlebih, yang harus dihukum dan dilarang bukan hanya kelompok terorisnya saja, negara yang berafiliasi dengan kelompok teroris tersebut juga harus dilarang. Maka dari itulah, mengurangi dukungan terhadap sebuah negara yang dianggap mendukung teroris, secara diplomatis, juga menjadi langkah politik memberantas terorisme.²⁶

Hukuman yang diberlakukan untuk memberantas terorisme menurut konsep ini adalah adanya pemberlakuan sanksi dan boikot terhadap negara yang memberi dukungan terhadap terorisme. Agar efektif, menurut konsep ini, hukuman tersebut harus disetujui oleh komunitas internasional, yang pada umumnya mewadahi hampir seluruh negara di dunia. Pemberian sanksi dan boikot ini meliputi adanya pembekuan aset, pelarangan dagang dan berpergian, pelarangan perdagangan senjata, dan bahkan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan investasi ke negara yang mendukung teroris.²⁷

Poin berikutnya mengenai kekuatan pertahanan negara, yaitu militer dan polisi. Pemberantasan terorisme melalui militer terbagi lagi menjadi dua kegunaan

²⁵ *Ibid*,102

²⁶ *Ibid*,103

²⁷ *Ibid*, 105

utama yang mengacu ke model *counterterrorism* yaitu CJM, ECJM dan WM. Dalam konsep ini ada dua kegunaan utama militer dalam melawan terorisme.

Kegunaan pertama adalah *military aid the civilian power* (MACP), yang mengacu terhadap model CJM dan ECJM. Adanya keterlibatan militer disini untuk melengkapi unit-unit polisi dengan tim-tim keahlian khusus yang dimiliki oleh pasukan militer seperti; penjinak senjata peledak, tim penyelamat sandera, pengawasan, regu penangkap, dan pendeteksi ancaman.²⁸ Aksi serta langkah yang dilakukan secara militer ini dapat dianggap legal apabila adanya kerja sama militer untuk menyerahkan senjata-senjata yang digunakan untuk diinvestigasi untuk menyajikan perincian terkait kejadian terorisme tersebut. Tujuan dari penggunaan militer ini juga agar tidak perlu adanya lagi servis atau agensi tambahan yang tentunya menambah pengeluaran biaya dalam pemberantasan terorisme.²⁹ Hal yang menjadi kekurangan dari konsep ini apabila diimplementasikan melalui kemiliteran, akan meningkatkan jumlah korban jiwa meskipun meningkatkan kapabilitas dari *counterterrorism* itu sendiri.

Sebelumnya telah disebutkan di poin mengenai langkah *counterterrorism* dengan militer mengenai keterlibatan polisi. Dalam mengatasi masalah terorisme ini, polisi memiliki peran untuk menjaga ketetapan hukum atas operasi-operasi yang memberantas para teroris. Hal tersebut dapat dilakukan melalui tugasnya yang mengumpulkan dan mempersiapkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan. Kepolisian juga dapat dijadikan sebagai alat deterensi yang mencegah terjadinya

²⁸ *Ibid*, 108

²⁹ *Ibid*.

serangan lain dari para teroris. Maka dari itu lah, kepolisian harus dipersiapkan dengan melakukan latihan serta *cross-training* yang biasanya dilakukan bersama dengan militer atau agensi-agensi yang berkaitan untuk melakukan *counterterrorism*. Kepolisian pun juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kooperasi secara nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengorganisir koneksi dengan para intelejen, militer, ataupun agensi setipe.³⁰ Peran polisi secara umum dapat disimpulkan sebagai alat negara untuk menjaga regulasi yang sejalan dengan pemerintahan dan selaras dengan paham demokratis dan hak asasi manusia.

Poin terakhir dalam teori ini adalah mengenai pembatasan pergerakan untuk memberantas terorisme. Secara latar belakang, konsep ini menganggap bahwa globalisasi ekonomi, penurunan hambatan perdagangan, serta kemudahan untuk bergerak memudahkan perkembangan teroris. Hal ini dikarenakan para kelompok teroris tersebut akan lebih mudah mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melangsungkan aksi terorismenya. Maka dari itu, pembatasan pergerakan bisa dijadikan sebagai penghambat untuk teroris melangsungkan aksinya. Hal ini dapat dilakukan melalui diperketatnya regulasi mengenai visa antar negara tetangga, kontrol di perbatasan, melakukan deportasi, *profiling*, pengusiran, dan lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan di tempat seperti bandara, stasiun, dan pelabuhan.³¹

³⁰*Ibid*, 114

³¹ *Ibid*, 113

Selain kedua konsep ini, ada konsep penyanding *counterterrorism* yang dapat digunakan untuk membedah penelitian ini. Konsep tersebut merupakan konsep *counterinsurgency*. Secara garis besar, konsep ini memiliki kesamaan dengan konsep *counterterrorism* dilihat dari tujuannya. Namun, pendekatan yang dimiliki konsep ini berbeda dari konsep yang sebelumnya dijelaskan. Dalam konsep ini ada langkah-langkah melawan pemberontak, yang bisa juga menjadi teroris, sebagai berikut:³²

1. Fokus terhadap penggunaan kekuatan bersenjata (kepolisian maupun militer) untuk menghancurkan para pemberontak.
2. Mempersiapkan secukupnya pasukan untuk mengantisipasi kembalinya serangan dari pemberontak. Pasukan ini ditempatkan di dusun, desa, dan kota dimana populasi tersebut tinggal.
3. Melakukan kontak dengan populasi di wilayah para pemberontak dan mengontrol pergerakan populasi tersebut dengan tujuan memutus hubungan dengan para pemberontak.
4. Menghancurkan organisasi atau badan atau kelompok pemberontak lokal.
5. Mengatur otoritas lokal sementara yang baru melalui pemilihan.
6. Menguji otoritas dengan cara memberikan tugas konkret serta mengganti orang-orang yang tidak kompeten. Selain itu juga perlu mengatur unit pertahanan wilayah tersebut.

³² David Galula, *Counterinsurgency Warfare* (Westport: Praeger Security International, 2006), 55-56

7. Mengelompokkan dan mendidik pemimpin baru mengenai gerakan politik nasional.
8. “Win Over” para kelompok pemberontak yang tersisa.

Berdasarkan langkah-langkah terkait konsep di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kelompok pemberontak harus dihancurkan. Namun, yang menjadi pembeda adalah perlunya pendekatan dengan masyarakat atau di konsep ini disebut sebagai populasi. Selain itu, perlu adanya perombakan secara politik yang dilakukan dilihat dari bagaimana perlu adanya pemilihan pemimpin wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali. Dari sini dapat dilihat bahwa konsep ini mengarahkan para *counterinsurgents* untuk mengeliminasi *roots of problems*. Selain itu, karakteristik dari konsep ini juga memenangkan ‘hati’ para populasi atau masyarakat terkait opini untuk melangsungkan konsep *counterinsurgency*.

Konsep *counterinsurgency* klasik atau sering disingkat sebagai COIN secara garis besar memiliki 9 pendekatan utama yaitu pengembangan, pengamanan, legitimasi, demokrasi, transmigrasi, *cost-benefit*, kontrol perbatasan, “*crush them*”, amnesti/penghargaan.³³ Hal-hal tersebut akan dijelaskan lebih rinci melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Pengembangan atau *development* ini terbentuk dari kata-kata “*hearts & minds*”.³⁴ Artinya, dengan adanya pengembangan atau modernisasi,

³³ Christopher Paul, Colin P. Clarke, and Beth Grill, *Victory Has a Thousand Fathers*, (CA: RAND, 2010), 32

³⁴ *Ibid*, 36

populasi tersebut juga akan mendapatkan hasil positif serta pemerintahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meskipun dalam hal ini modernisasi akan memicu banyak kontra dan disrupsi di dalam populasi itu sendiri karena akan banyak hal yang mengalami perubahan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui investasi jangka pendek. Selain itu menurut konsep ini untuk daerah berkonflik, kekuatan militer seharusnya tidak lebih dari kekuatan para pemberontak.³⁵

2. Pengamanan atau dalam konsep ini disebut sebagai *pacification* merupakan penindaklanjutan yang lebih ke arah politik. *Pacification* ini diberlakukan dengan cara pembuatan persepsi akan keamanan untuk mempertahankan area yang telah diselamatkan oleh COIN. Sama dengan poin sebelumnya yaitu pengembangan, dalam poin ini, investasi jangka pendek juga diperlukan untuk mengembangkan serta mereformasi infrastruktur di area berkonflik. Dan juga dalam poin ini perlu adanya perluasan daerah aman oleh kekuatan COIN.³⁶
3. Legitimasi merupakan poin yang juga cukup penting dalam COIN. Hal ini dikarenakan oleh persepsi orang-orang yang condong lebih percaya kepada pihak yang memiliki legitimasi terbaik. Dengan memberikan pencerahan bahwa para pemberontak tersebut merupakan kelompok yang dilarang atau *illegitimate*, mereka akan kehilangan pendukung.³⁷ Selain itu, poin mengenai legitimasi juga menggambarkan bahwa COIN harus menghindari

³⁵ *Ibid*, 37

³⁶ *Ibid*, 39

³⁷ *Ibid*, 41

adanya kerusakan berlebihan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, dan juga penggunaan kekerasan secara tidak sah dalam area konflik.³⁸

4. COIN juga mengutamakan demokrasi dalam tindakan-tindakannya. Hal ini dikarenakan adanya legitimasi yang diberikan oleh pemerintah yang pada umumnya menghargai hak asasi manusia dan hak-hak demokrasi dasar lainnya.³⁹
5. Poin mengenai transmigrasi memiliki kesamaan dengan poin pengembangan (*development*). Hal ini dikarenakan tentunya akan ada banyak perubahan yang dialami oleh populasi yang bertransmigrasi tersebut. Guna dari poin transmigrasi adalah adanya pemisahan antara para pemberontak dan populasi.⁴⁰ Selain untuk pemisahan, hal ini juga dapat dilakukan untuk mengontrol populasi di area konflik tersebut.
6. Poin selanjutnya adalah mengenai *cost-benefit* dimana COIN harusnya memberikan gangguan terhadap sistem para pemberontak. Baik itu dalam hal sistem, perekrutan, intelijen, keuangan dan lainnya.⁴¹ Selain itu konsep ini juga memilih strategi yang memperhitungkan biaya seefektif mungkin untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan operasi.
7. Kontrol perbatasan juga merupakan poin penting dalam COIN. Perbatasan merupakan daerah yang sangat penting bagi para pemberontak dan sering

³⁸ *Ibid*, 42

³⁹ *Ibid*, 44

⁴⁰ *Ibid*, 46

⁴¹ *Ibid*, 49

digunakan sebagai sarangnya. Selain itu, dengan adanya kontrol perbatasan untuk mencegahnya peningkatan yang bertempur. Juga, dengan adanya kontrol perbatasan, legitimasi internasional lebih terjaga.⁴²

8. Poin mengenai amnesti dan penghargaan dianggap sebagai poin yang sebenarnya kurang merepresentasikan konsep ini. Program amnesti menurut COIN dapat dijadikan sebagai langkah utama untuk melakukan pelucutan senjata, demobilisasi, dan proses reintegrasi.⁴³ Amnesti atau penghargaan semahal apapun sebenarnya dianggap lebih menguntungkan dalam hal biaya dibandingkan harus mengerahkan pasukan dan operasi militer.⁴⁴

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai metode utama penelitian. Metode kualitatif menurut Bryman adalah strategi penelitian yang lebih memperhatikan kata dibandingkan kuantifikasi (angka) dalam pengumpulan dan analisis data. Bryman menjabarkan langkah-langkahnya dalam melakukan penelitian kualitatif.⁴⁵ Penelitian ini melibatkan adanya proses yang diawali dengan pertanyaan penelitian, penseleksian subyek, pengumpulan data yang relevan, penginterpretasian data yang dapat disandingkan dengan sebuah konsep atau teori dan nantinya akan menghasilkan sebuah konklusi akan penelitian tersebut. Berdasarkan tahapan yang sangat sistematis tersebut, penulis juga akan menulis

⁴² *Ibid*, 50

⁴³ *Ibid*, 53

⁴⁴ *Ibid*, 54

⁴⁵ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 380-386

penelitian ini secara sistematis sesuai dengan tahapan yang telah dijabarkan oleh Bryman.

Menurut Bryman, penelitian kualitatif ini bisa mengandalkan dokumen sebagai sumber data. Dokumen-dokumen tersebut harus dapat dibaca, dapat diakses, dan relevan dengan topik yang dipilih oleh peneliti. Dokumen-dokumen ini bisa juga berasal dari dokumen resmi yang dikeluarkan sebuah negara, sumber pribadi, maupun media massa.⁴⁶ Dokumen-dokumen tersebut tentunya memiliki kriteria tersendiri yaitu asli atau dalam buku ini disebut *authentic*, berasal dari sumber terpercaya, memenuhi syarat dari tipe sesuai dokumen yang dipilih, serta jelas dan mudah dipahami.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan tersebut agar dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan metode analisis naratif milik Bryman. Dalam metode tersebut, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan menarasikan data-data yang didapat melalui penelitian-penelitian lainnya. Metode analisis naratif ini tidak hanya menggunakan hasil wawancara saja sebagai sumbernya. Dokumen-dokumen yang merupakan data penelitian dapat menjadi strategi untuk menganalisa yang baik. Hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam hal mengklasifikasikan karakter, *setting*, hubungan yang bersifat sebab-musabab, dan tema dari penelitian itu sendiri. Dengan metode ini, penelitian dapat didemonstrasikan lebih konsisten

⁴⁶ *Ibid*, 549-551

⁴⁷ *Ibid*, 544

berdasarkan nilai-nilai serta ekspektasi yang telah dijabarkan.⁴⁸ Dengan metode ini, penelitian ini secara umum akan menarasikan data-data yang telah didapat oleh penulis untuk menyimpulkan akhir analisis dari hasil penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Pembagian bahasan dalam penulisan ini memudahkan penulis dalam memberikan gambaran yang sistematis mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai latar belakang dari topik yang dipilih oleh penulis, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur mengenai topik yang dipilih serta kerangka pemikiran yang dipilih oleh penulis untuk meneliti topik ini. Pembahasan mengenai permasalahan dibatasi dan dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian mengenai masalah tersebut. Penulis juga menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB II: Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan India pada Masa Pemerintahan Narendra Modi

Bab II diawali dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris yang berasal dari Pakistan. Selanjutnya bab ini membahas mengenai kebijakan pertahanan Narendra Modi

⁴⁸ Ibid, 584

terkait perlawanan terorisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pembahasan kepolisian India dan kekuatan militer India. Bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Narendra Modi terkait hubungannya dengan negara Pakistan dan diperdalam lagi melalui sub-sub bab dengan pembahasan kebijakan regionalisme India.

BAB III: Analisis Kebijakan Narendra Modi dalam Menekan Gerakan Kelompok Teroris Pakistan di India

Bab III memberikan analisis kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab II. Analisis tersebut disertai dengan kerangka pemikiran yang telah dipilih oleh penulis. Penulis juga memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Narendra Modi dalam menjaga keamanan India yang terus menerus diancam oleh Pakistan. Penulis menggunakan dua konsep sebagai pembandingan kebijakan yang bersifat militeristik dan bersifat *soft approach*. Dan kedua penjelasan tersebut disimpulkan dan dibandingkan di akhir bab ini.

BAB IV: Kesimpulan

Bab IV merupakan kesimpulan dari data-data hasil analisis yang dirangkum oleh penulis. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.